

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Persaingan dunia usaha yang kompetitif serta keadaan perekonomian yang dapat terjadi perubahan, perusahaan akan mengalami masalah dengan resiko tinggi yaitu mengalami kesulitan terutama keuangan biasa disebut *financial distress*. Menurut Platt dan Platt (2002, dalam Sastriana, 2013) fase penurunan keuangan yang terjadi pada perusahaan sebelum mengalami kebangkrutan adalah *financial distress*. Dalam keadaan masalah keuangan ini menimbulkan adanya ketidakpercayaan serta sikap ragu bagi para investor untuk melakukan investasi dan untuk kreditur sebagai evaluasi kredit perusahaan.

Masalah keuangan (*financial distress*) yang terjadi pada perusahaan dimulai dengan tidak dapat membayar hutang yang telah ditentukan tanggalnya atau tidak dapat membayar kewajibannya tersebut. Pada saat kondisi itu terjadi maka akan menimbulkan perhatian dari pihak-pihak eksternal, seperti kreditur, investor dan pemerintah. Jika tidak segera ditindaklanjuti, maka perusahaan dapat mengalami kebangkrutan (Adityaputra, 2017).

Platt dan Platt (2002, dalam Hanifah dan Purwanto, 2013) menyebutkan informasi kesulitan keuangan pada perusahaan berguna sebagai alat prediksi sehingga manajemen dapat bertindak dengan cepat untuk mencegah sebelum terjadinya kebangkrutan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah mengakuisisi atau pengambilalihan. Adanya informasi mengenai kondisi kebangkrutan lebih awal, dapat memberikan kesempatan bagi manajemen, pemilik, investor, regulator, dan para *stakeholders* untuk melakukan cara-cara yang sesuai (Fifrianti dan Santosa, 2018).

Regulator seperti PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat dalam memfasilitasi dan membuat regulasi terkait pasar modal Indonesia, Bursa Efek Indonesia (BEI) berusaha mewujudkan pasar yang teratur, transparan, dan efisien (Bursa Efek Indonesia, 2020). Untuk itu, Bursa Efek Indonesia (BEI) membuat regulasi terkait beberapa hal, termasuk perusahaan

yang sahamnya diperdagangkan (*listing*). Bursa Efek Indonesia (BEI) akan memberi peringatan hingga sanksi pada perusahaan yang melanggar aturan yang ada, dimana sanksi terberatnya adalah *delisting*.

Penghapusan saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah *delisting* (Pengertian mengenai *delisting* dan *relisting*, 2020). Dalam tahun 2018, BEI mengeluarkan perusahaan dari Bursa yaitu : PT. Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk, dimana Bursa Efek Indonesia memberlakukan proses *delisting* paksa dikarenakan perusahaan mengalami gagal bayar terhadap PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) selaku kreditur. Pada tanggal 18 Mei 2018 dinyatakan resmi keluar oleh BEI karena pailit dinyatakan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Tuntutan pailit itu datang dari PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Tbk yang menilai kepailitan debiturnya PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk menjadi jalan satu-satunya jalan untuk mendapatkan pengembalian utang (Kasus utang, Pengadilan Jakarta Pusat tetapkan DAJK pailit, 2017). Dari kasus tersebut bisa dilihat bahwa PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk (DAJK) ada di dalam kondisi mengalami kebangkrutan dikarenakan kinerja keuangan perusahaan sebagai perusahaan publik tidak sehat dengan hutang dalam jumlah besar kepada kreditur yaitu perbankan sebesar Rp 870,17 miliar dan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) sehingga perusahaan mengalami gagal bayar.

Menurut Porter, 1991 (dalam Wardhani, 2007) menyebutkan penyebab perusahaan akan sukses dan gagal terdapat pada kebijakan yang diaplikasikan perusahaan, salah satunya adalah penerapan *corporate governance*. Implementasi *corporate governance* yang tepat akan menciptakan kondisi pemantauan yang tepat pula, sehingga berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dan meminimalisir resiko perusahaan mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*). Terjadinya kondisi kesulitan keuangan akan membuka kesadaran berbagai pihak mengenai dampak implementasi tata kelola perusahaan terhadap kegiatan perekonomian. Apabila tata kelola perusahaan diterapkan dengan baik maka membantu perusahaan dalam membenahi kondisi keuangan perusahaan (Triwahyuningtias, 2012). *Good Corporate Governance* adalah mekanisme

kepengurusan yang dipakai oleh organ perusahaan, jika penerapannya baik maka meningkatkan nilai ekonomi jangka panjang kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan berdasar pada undang-undang (KNKG, 2006).

Mekanisme *corporate governance* merupakan prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol dan pengawasan terhadap keputusan yang telah diambil (Thaharah dan Asyik, 2016). Iskandar dan Chamlaio (2000, dalam Amperaningrum dan Sari, 2013) menyebutkan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan mencakup internal dan eksternal. Mekanisme internal adalah cara yang dilakukan oleh perusahaan melalui struktur internal seperti dewan direksi, dewan komisaris, dan pertemuan dengan dewan direksi serta rapat umum pemegang saham untuk mengendalikan perusahaan. Mekanisme eksternal yaitu cara yang dilakukan oleh perusahaan melalui pihak eksternal seperti kepemilikan institusional, pelaksanaan audit oleh auditor eksternal serta pengendalian yang dilakukan oleh pasar. Menciptakan nilai lebih untuk seluruh pihak yang berkepentingan merupakan tujuan mekanisme *corporate governance*, sehingga konflik antara pihak manajemen dan pemegang saham tidak timbul (Bodroastuti, 2009). Untuk mengurangi masalah agensi antara manajer dan pemilik, tata kelola perusahaan perlu diterapkan sehingga kepentingan antara manajer dan pemilik perusahaan menjadi selaras (Triwahyuningtias, 2012). Penerapan *corporate governance* yang benar akan melindungi kreditur dan pemegang saham, sehingga bisa meyakinkan dirinya untuk memperoleh investasinya kembali yang bernilai tinggi dan wajar (FCGI, 2006). Penerapan konsep *corporate governance* didasarkan pada teori keagenan. Teori keagenan adalah relasi antara pemilik dan manajemen yang didalamnya ada kontrak salah satu pihak (Jensen & Meckling, 1976 dalam Ningrum dan Hatane, 2017). Teori keagenan dapat menimbulkan asimetri informasi antara manajemen dan investor. Asimetri informasi adalah ketidakseimbangan dalam memperoleh informasi antara manajemen dengan pemegang saham

Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan direksi, dan komisaris independen adalah mekanisme *corporate governance* yang dipakai

dalam penelitian ini. Kepemilikan institusional menjelaskan adanya saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi. Kepemilikan institusional dapat meminimalisir konflik agensi dengan pengawasan perusahaan sehingga manajemen bertindak tanpa merugikan pemegang saham (Hanifah dan Purwanto, 2013). Menurut penelitian Sulistyowati (2019) kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kesulitan keuangan. Penelitian Hanifah dan Purwanto (2013) menyebutkan kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap *financial distress*.

Besaran proporsi saham yang dimiliki oleh manajer adalah kepemilikan manajerial. Kepemilikan pihak manajer dapat meminimalkan konflik agensi yang muncul dalam perusahaan, karena pihak manajemen dalam pengambilan keputusan dilakukan dengan tanggung jawab dan kontrol terhadap manajemen. Sehingga *financial distress* dapat dicegah. (Triwahyuningtias, 2012). Menurut penelitian Sulistyowati (2019) dan Cinantya (2015) bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Sedangkan penelitian Hanifah dan Purwanto (2013) menyebutkan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *financial distress*.

Pihak yang ada di dalam perusahaan yang bertugas untuk mengelola dan mengurus perusahaan sesuai kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai kebijakan adalah dewan direksi. Jumlah dewan direksi dalam setiap perusahaan berbeda tergantung pada kebutuhan setiap perusahaan, tetapi idealnya adalah paling sedikit terdapat dua orang dewan direksi, maka setiap kepengurusan perusahaan akan dikelola dengan baik sesuai bidang masing-masing dan dapat mengurangi *financial distress*. Menurut penelitian Sulistyowati (2019) dewan direksi memiliki pengaruh positif terhadap *financial distress*. Sedangkan penelitian Hanifah dan Purwanto (2013) menyebutkan dewan direksi berpengaruh negatif terhadap *financial distress*.

Dalam POJK No. 33/POJK.04/2014 komisaris independen adalah bagian perusahaan yang datang dari luar perusahaan. Komisaris independen berfungsi untuk menurunkan konflik agensi pada perusahaan, dengan kontrol yang tepat kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh manajer dan kondisi *financial*

distress dapat di hindari (Pangeran dan Salaunaung, 2016). Menurut penelitian Rahmawati (2015) bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Sedangkan penelitian Cinantya (2015) dan Hanifah (2013) yang membuktikan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Selain mekanisme *corporate governance*, terdapat rasio *leverage* yang dapat mempengaruhi kondisi *financial distress*. Rasio *leverage* adalah mengukur seberapa jauh kegiatan suatu perusahaan didanai oleh hutang dan akan menimbulkan adanya kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi beserta dengan bunganya. Jika rasio *leverage* semakin rendah, perusahaan dapat dikatakan baik karena kekayaan perusahaan yang dibiayai hutang sedikit (Triwahyuningtias, 2012). Maka perusahaan harus mengimbangnya dengan memperoleh pemasukan lebih, jika tidak, *financial distress* akan terjadi. Menurut penelitian Sulistyowati (2019) dan Cinantya (2015) bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Sedangkan penelitian Hanifah dan Purwanto (2013) menyebutkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *financial distress*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan terdapat hasil penelitian yang berbeda pada peneliti terdahulu, maka penelitian ini dilakukan kembali untuk menguji bagaimana pengaruh mekanisme *corporate governance* dan *leverage* perusahaan terhadap kondisi *financial distress* pada perusahaan manufaktur di Bursa pada periode 2016 - 2018. Alasan peneliti menggunakan perusahaan manufaktur karena perusahaan manufaktur membutuhkan dana yang besar untuk mendukung aktivitas produksi terutama memperoleh aset tetap (tanah, bangunan pabrik, dan mesin) yang biasanya tidak cukup jika hanya mengandalkan sumber pendanaan dari modal saja namun membutuhkan sumber pendanaan lain seperti investor eksternal dan kreditur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian adalah :

1. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Financial Distress*?

2. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap *Financial Distress*?
3. Apakah Dewan Direksi berpengaruh terhadap *Financial Distress*?
4. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Financial Distress*?
5. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Financial Distress*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Financial Distress*.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Financial Distress*.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh Dewan Direksi terhadap *Financial Distress*.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh Komisaris Independen terhadap *Financial Distress*.
5. Menguji dan menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap *Financial Distress*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Sebagai dasar bagi para peneliti selanjutnya dengan topik yang sama yaitu pengaruh mekanisme *corporate governance* dan *leverage* terhadap *financial distress*.

2. Manfaat Praktis

Bagi pemegang saham dan kreditor dapat memberikan informasi dengan melihat potensi perusahaan yang mengalami *financial distress* yang dapat membantu dalam mengambil keputusan investasi dan kredit.

1.5 Sistematis Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini terdapat lima bab yang diuraikan secara singkat dan sistematis sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah yang ada, perumusan masalah yang ada, serta berisi tujuan masalah, manfaat penelitian yang dilakukan dan sistematis penulisan skripsi.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan mengenai landasan teori -teori yang menjadi dasar dan menudukung penelitian ini, penjelasan mengenai penelitian terdahulu, serta pengembangan hipotesis yang ada dan model penelitian/rerangka konseptual yang digunakan.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai desain penelitian, identifikasi variable, definisi, serta pengukuran untuk variabel yang digunakan. Selain itu, bab ini juga berisikan jenis, sumber dan metode pengumpulan data yang digunakan, kemudian populasi, sampel, dan teknik penyampelannya, serta bagaimana analisis datanya dilakukan.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan mengenai gambaran umum suatu objek yang digunakan dalam penelitian ini, deskripsi dan hasil analisis data yang dilakukan, serta pembahasan atas hasil analisis data yang telah dilakukan tersebut.

BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab terakhir ini berisikan kesimpulan mengenai hasil penelitian yang berisikan jawaban dari rumusan masalah dan keterbatasan apa saja yang ada dalam penelitian ini, serta saran bagi peneliti yang selanjutnya.